



---

**Tiongkok: Analisa *Balance Of Power* dalam Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada Tahun 2018**

**Khakimatul Khoiriyah**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*China became an emerging economic power whose the presence in international affairs, that cause United States as a hegemon felt its position and national security threatened. This research would explained how China effort to balance the power of United States as a hegemon which is cause trade wars between both countries on 2018. This research use neorealism theory, specifically defensive realism with balance of power concept. This research argues that Belt and Road initiative, Made in China 2025 development project, technology development as a defense strategy and geopolitical strategy are the balancing way that be done by China which triggerred trade wars with Unites States. Data is collected using literature reviews, documentation, and official government archives. The results of this study indicate that the initiation carried out by China with belt and road initiative, made in China 2025, technology development as a defense strategy and geopolitical strategy are China's effort to balance power with the United States as a hegemon, the power used by China in balancing power with the United states is combination from both forms of power between material strength (hard power) and latent power (soft power) possessed by a country, that is smart power.*

**Keywords :** *emerging power, hegemony, balance of power, smart power.*

**PENDAHULUAN**

Republik rakyat Tiongkok (RRT) merupakan *emerging industrial economic* yang kehadirannya mulai diperhitungkan di dekade belakangan karena tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonominya yang pesat pasca reformasi yang dilakukan oleh pemimpin Deng Xiao Ping pada tahun 1978. Reformasi ekonomi yang dilakukan yaitu dengan mengubah sistem ekonomi dari sistem ekonomi komando ke sistem ekonomi sosialis-kapitalis. Perubahan tersebut diawali dengan mendorong penerimaan investasi asing, membuka perdagangan bebas, pengurangan kontrol negara terhadap bidang perdagangan, agrikultur dan industri dengan desentralisasi, serta membangun infrastruktur untuk mendorong zona ekonomi khusus dan modernisasi ekonomi. Pada akhirnya reformasi tersebut membuahkan hasil yang dibuktikan berdasarkan data dari *World bank* melalui pertumbuhan *Gross Domestic Product* Tiongkok yang mengalami peningkatan dengan rata-rata 9,2% setiap tahunnya, dengan capaian tertinggi pada tahun 1984 sebesar 15,1% dan 2007 sebesar 14,2%, memasuki tahun 2010 hingga 2019 produk domestik bruto Tiongkok menglaami penurunan setiap tahunnya, hal ini menurut para ahli merupakan dampak dari kejenuhan pasar atau ekonomi Tiongkok yang memasuki masa-masa stagnansi atau dikenal dengan istilah "*middle-income trap*" dimana Tiongkok dituntut

untuk melakukan pembaharuan pasar dan inovasi agar perekonomian Tiongkok naik level (Hongying, 1999 p. 538-539) (Morrison, 2019: 5).

Dengan banyaknya sumber daya tenaga kerja dan didukung upah kerja yang rendah yang berdampak pada biaya produksi yang rendah menjadi daya tarik bagi perusahaan asing untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di Tiongkok, salah satunya Amerika Serikat. Tiongkok merupakan partner dagang terbesar Amerika Serikat, menjadi mitra dagang manufaktur terbesar, sumber impor terbesar dan sebagai pangsa pasar ekspor ke-tiga Amerika Serikat, selain itu Tiongkok juga pemegang surat hutang terbesar senilai 1,1 triliun pada tahun 2019. Di bidang perdagangan Tiongkok merupakan negara manufaktur terbesar di dunia dengan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan Jepang dengan Amerika Serikat, menurut data dari *World Bank* pada tahun 2006 pertumbuhan manufaktur Tiongkok mencapai 0,89 triliun USD dan setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,33 triliun USD dengan capaian sebesar 3,46 triliun USD tahun 2017, sedangkan Jepang pada tahun 2006 mencapai 0,97 triliun USD dan Amerika Serikat mencapai 1,7 triliun USD pertumbuhan manufaktur kedua negara cenderung stagnan (Morrison, 2019: 1).

Tiongkok merupakan mitra dagang utama bagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Eropa dan Asia Tengah, Amerika Utara, Amerika Serikat dan Jepang, diantara ke-lima mitra dagangnya tersebut pada tahun 2018 Tiongkok mengalami surplus dagang dengan empat mitra dagang utamanya seperti negara-negara Asia Timur dan Pasifik dengan total perdagangan sebesar 1,8 miliar USD, impor dagang sebesar 936 juta USD, ekspor sebesar 944 juta USD dari perdagangan ini Tiongkok mengalami surplus dagang sebesar 8 juta USD. Eropa dan Asia Tengah dengan total dagang sebesar 919 juta USD dengan surplus sebesar 114 juta USD, Amerika Utara dengan total ekspor Tiongkok sebesar 515 juta USD dan surplus dagang sebesar 331 juta USD, dengan Amerika Serikat surplus dagang Tiongkok sebesar 324 juta USD dimana ketiga negara sebelumnya terhitung secara kolektif sedangkan Amerika Serikat sebagai satu negara, dan dengan Jepang, Tiongkok mengalami defisit dagang sebesar 33 juta USD ([www.wits.worldbank.org](http://www.wits.worldbank.org), 2020). Defisit dagang yang dialami Amerika Serikat memicu penerapan proteksi dagang terhadap Tiongkok yang didasarkan pada hukum perdagangan domestik Amerika Serikat yang tertuang dalam *section 201* dari UU Perdagangan tahun 1974 yang mengizinkan presiden untuk memberlakukan pajak sementara dan tindakan dagang lainnya apabila Komisi Perdagangan Internasional menentukan lonjakan impor adalah penyebab substansial atau ancaman serius pada industri AS. *Section 232* dari UU ekspansi perdagangan 1962, mengizinkan Presiden untuk menyesuaikan impor apabila Departemen perdagangan menemukan produk tertentu diimpor dalam jumlah atau keadaan tertentu untuk merusak keamanan nasional AS. *Section 301* UU Perdagangan 1974, mengizinkan USTR untuk meneguhkan konsesi perjanjian perdagangan atau memberlakukan batasan impor jika itu menghalangi mitra dagang AS melanggar komitmen perjanjian perdagangan atau terlibat dalam praktik diskriminatif atau tidak masuk akal yang memberatkan atau membatasi perdagangan AS (William et.al., 2019: summary), yang kemudian menimbulkan perang dagang antara kedua negara.

Kebijakan proteksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perdagangan bebas yang apabila terjadi aksi saling balas dari negara lawan akan menimbulkan perang dagang dimana menurut Larisa Kapustina dalam *U.S. – China trade war: causes and outcomes* perang dagang tidak menghasilkan pemenang, yang ada hanya kerugian bagi semua pihak. Perang dagang yang terjadi antara pemerintah Amerika Serikat dengan Tiongkok bukan didasarkan pada alasan ekonomi yang dirasa merugikan pemerintah Amerika Serikat tetapi juga aspek politik, militer dan teknologi, dimana Tiongkok sebagai *emerging economic power* sedang giat melakukan pengembangan dan modernisasi, akan tetapi oleh Amerika Serikat upaya modernisasi Tiongkok dianggap sebagai ancaman untuk keberlangsungan kekuatannya di kancah internasional khususnya di wilayah Asia-Pasifik. Proteksi dagang oleh Amerika Serikat sudah di canangkan

semenjak kampanye presiden Donald Trump pada 2016, dimana industri ekonomi domestik Amerika serikat mengalami kelesuan karena serbuan produk asal Tiongkok sehingga untuk mengembalikan dan menggenjot ekonomi domestik pemerintah Amerika serikat melakukan investigasi terhadap beberapa produk dan perusahaan asal Tiongkok yang dianggap mengancam industri dan keamanan nasional Amerika serikat.

Dengan menggunakan teori Neorealisme dari realisme konsep *balance of power*, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan upaya modernisasi yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika serikat sebagai hegemon sehingga menghasilkan perang dagang antara kedua negara pada tahun 2018.

## PEMBAHASAN

Menurut Yuhan Zhang dalam tulisannya yang berjudul *The U.S. – China Trade War* sejumlah akademisi termasuk Maersheimer mengatakan bahwa kebangkitan Tiongkok akan memunculkan tantangan baru dan menggeser kekuatan dominasi yang ada yaitu Amerika serikat sehingga dapat memunculkan konflik yang tidak dapat dihindari antar *great powers*. Keterbukaan pasar oleh Tiongkok membawa ekonomi Tiongkok meningkat mendahului kekuatan-kekuatan sebelumnya seperti Meksiko dan Jepang, bahkan diprediksikan *gross domestic product* Tiongkok pada 2030 akan melampaui Amerika serikat (Lau, 2019: 2 – 3). Munculnya Tiongkok sebagai *rising power* dan berhadapan dengan kekuatan hegemoni Amerika serikat menjadikan tindakan apapun yang dilakukan Tiongkok dianggap sebagai ancaman oleh Amerika serikat, perang dagang merupakan bentuk akibat dari kebangkitan Tiongkok yang dilihat oleh Amerika serikat sebagai ancaman, adapun upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam menyeimbangkan kekuatan Amerika serikat dilakukan dengan memanfaatkan sumber kekuatan yang dimilikinya, yaitu kekuatan yang bersifat material (*hard power*) seperti kapabilitas dan persenjataan militer dan kekuatan laten (*soft power*) seperti perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, dimana kombinasi antara kedua kekuatan tersebut disebut sebagai *smart power*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### *Smart power Tiongkok dalam Politik Internasional*

Menurut Friedlander dalam tulisan Bruno Masciatelli yang berjudul *Hue and cry over Huawei: Cold war tensions, security threats or anti-competitive behavior?* bahwa teknologi tinggi menjadi sangat penting untuk bidang pertahanan, perdagangan dan organisasi sosial. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tentu berdampak positif pada sektor maupun bidang lainnya termasuk bidang riset dan pengembangan, anggaran pada bidang riset dan pengembangan Tiongkok semenjak tahun 2000 – 2018 mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,5% setiap tahunnya dan berkisar di angka 2% pada tahun 2018, berbeda dengan Amerika serikat dimana anggaran yang dikeluarkan lebih besar dari Tiongkok akan tetapi dari tahun 2000 – 2018 cenderung stagnan, bahkan beberapa tahun mengalami penurunan anggaran. Kompetisi antar *great powers* di masa mendatang akan didominasi oleh sektor teknologi khususnya *artificial intelligence*, dimana sektor ini akan memberikan dampak bagi kekuatan negara khususnya melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas militer, negara yang berhasil menguasai atau unggul dalam teknologi *artificial intelligence* akan menjadi *global leader*, Tiongkok dengan proyek *made in China 2025*-nya sudah fokus dalam pengembangan teknologi *artificial intelligence* seperti robotik dan sistem pertahanan dan keamanan, pemindai wajah atau biometrik dan senjata tak berawak. Produk-produk tersebut sudah diekspor oleh perusahaan Tiongkok ke beberapa negara seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Zimbabwe, Malaysia, Ethiopia, Ekuador, Afrika selatan, Bolivia, Mesir, dan Rwanda (Sherman, 2019: 1 -7).

Perkembangan teknologi di Tiongkok telah menghasilkan perusahaan raksasa yaitu Huawei Technologies Co.Ltd. dan ZTE Corporation yang bergerak dibidang pengembangan dan penyediaan perangkat lunak dan komponen komputer dan telepon seluler. Kedua

perusahaan asal Tiongkok tersebut telah menjadi pusat dalam pengembangan teknologi masa depan jaringan seluler 5G, yang kemudian pemerintah Amerika Serikat memberlakukan pelarangan terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk tidak membeli dan melakukan kerjasama perdagangan dengan perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok karena kecurigaan pemerintah Amerika Serikat terhadap penggunaan *dual-use technologies* yang dilakukan oleh Tiongkok, dimana komponen yang ada dalam perangkat lunak yang diproduksi oleh perusahaan asal Tiongkok memiliki tujuan lain yaitu sebagai alat spionase (Masciatelli, 2019: 1 – 6).

### *Strategi Geopolitik*

Dalam bidang militer Tiongkok kalah jauh dengan Amerika Serikat, dilihat dari anggaran militer kedua negara, anggaran militer pemerintah Amerika Serikat rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,7% semenjak tahun 2000 – 2018, dengan angka peningkatan tertinggi pada tahun 2010 sebesar 4,65%. Sedangkan untuk pemerintah Tiongkok, hanya berkisar pada angka 2% selama 18 tahun kebelakang, selain anggaran militer kedua negara menandatangani perjanjian proliferasi nuklir (*Nuclear Proliferation Treaty / NPT*) yang hanya mengakui lima negara yang dibolehkan untuk memiliki senjata nuklir, urutan banyaknya jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh anggota NPT yaitu Rusia menempati urutan pertama dengan jumlah 6490 hulu ledak, Amerika Serikat 6185 hulu ledak, Prancis memiliki sebesar 300 hulu ledak, Tiongkok sebanyak 290 hulu ledak dan Inggris raya sebanyak 200 hulu ledak ([www.armscontrol.org](http://www.armscontrol.org), 2020). Meski dilihat dari jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk militer-nya lebih besar daripada Tiongkok dan kepemilikan senjata nuklir yang berbeda jauh jumlah antara kedua negara, akan tetapi pengaruh dan klaim Tiongkok di Laut China Selatan membuktikan bahwa pemerintah Amerika Serikat merasa terancam pengaruhnya di Asia Pasifik.

### *Arah Ekonomi dan Perdagangan: Alat Politik Luar Negeri dalam Program Belt and Road Initiative / BRI*

*Belt and Road Initiative* merupakan proyek yang diumumkan oleh presiden Xi Jin Ping pada tahun 2013 saat kunjungannya ke negara-negara Asia Tenggara dan Tengah. Inisiasi ini bertujuan untuk mempromosikan konektivitas dan pembangunan infrastruktur, memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi, meningkatkan strategi pembangunan yang saling melengkapi dan mendorong pembangunan yang saling terhubung untuk mencapai kesejahteraan bersama (Kim, 2018: 33). Proyek ini berakar pada sejarah masa lalu akan tetapi memiliki tujuan untuk masa depan, dimana menghubungkan tiga benua sekaligus, yaitu benua Asia, Eropa dan Afrika (Morrison, 2019: 34-36). Proyek ini telah melibatkan sebanyak 70 negara yang mencakup 70% populasi dunia, yang terhitung memegang 55% produk nasional bruto dunia dan 70% cadangan energi global (Kim, 2018: 33).

Guna mendukung terlaksananya proyek BRI ini, pemerintah Tiongkok mendirikan lembaga keuangan yang dapat berfungsi mendanai pembangunan infrastruktur di negara-negara yang terlibat dalam proyek BRI yaitu *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*. Motivasi awal pendirian AIIB yaitu kekhawatiran pemerintah Tiongkok terhadap proses reformasi tata kelola ekonomi yang lamban pasca krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Bank ini berpusat di Beijing dengan dana awal sebesar 100 miliar USD dan mulai beroperasi untuk mendanai pembangunan infrastruktur di negara anggota BRI pada 2016, pada tahun 2018, AIIB beranggotakan 87 negara dengan total investasi sebesar 6,4 miliar USD. Tiongkok mengklaim kedua proyek ini akan menghubungkan negara, pasar dan jasa untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkembang dan mencapai kesejahteraan (Kim, 2019: 33-34).

Selain itu, Tiongkok juga mendirikan bank dengan aliansi dagang-nya yang tergabung dalam *BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa)* yaitu *New Development Bank*

(NDB) diresmikan pada Juli 2014. Bank ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sosial ekonomi di negara-negara asia dengan menyediakan dana untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang, pemerintah Tiongkok mengeluarkan dana sebesar 100 miliar USD. BRICS merupakan aliansi dagang yang dibangun pada 2001, aliansi ini bukan merupakan aliansi politik atau asosiasi perdagangan formal akan tetapi mereka menegaskan bahwa mereka memiliki kekuatan sebagai blok ekonomi. Setiap tahunnya masing-masing pemimpin negara menghadiri pertemuan tahunan. Tujuan dari BRICS adalah menjadi pemasok dominan barang-barang produksi, jasa dan bahan mentah pada tahun 2050 ([www.investopedia.com](http://www.investopedia.com) , 2020).

#### *Proyek Inisiasi Made in China 2025*

Dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh Tiongkok yang mengalami stagnansi ekonomi atau masa transisi, *middle-income trap*, pemerintah Tiongkok berinovasi dengan menggeser fokus perdagangan Tiongkok yang semula lebih condong pada produksi barang dan investasi asing sekarang lebih menekankan pada konsumsi pribadi, jasa dan melakukan inovasi dengan menggagas proyek “*made in China 2025*” (Morrison, 2019: 1). *Made in China 2025* merupakan inisiasi untuk meng-*upgrade* industri Tiongkok secara komprehensif dengan menerapkan *intelligent manufacturing* yaitu alat teknologi informasi untuk proses produksi dengan menggunakan internet untuk menghubungkan perusahaan kecil hingga menengah agar bekerja lebih efisien dalam produksi global dan masal. Proyek ini terinspirasi oleh Industri 4.0 Jerman yang mulai diperbincangkan pada tahun 2011 dan diadopsi pada tahun 2013 (Kennedy, CSIS). *Made in China 2025* merupakan rencana pengembangan industri sepuluh tahunan Tiongkok yang berfokus pada penggunaan teknologi tinggi untuk memproduksi robotik, teknologi informasi, aviasi dan kendaraan dengan energi terbarukan, peralatan pertanian, listrik dan obat-obatan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan persaingan industri dan mengurangi ketergantungan Tiongkok terhadap teknologi asing (Kim, 2018: 34).

#### *Analisis Smart Power Tiongkok terhadap Perang Dagang dengan Amerika Serikat*

Upaya penyeimbangan kekuatan oleh Tiongkok dilakukan dengan menggunakan dua sumber kekuatan Tiongkok yang terbagi dalam kekuatan material dan kekuatan laten. Kedua kekuatan tersebut saling berkaitan, dimana dalam bidang ekonomi dan perdagangan Tiongkok menginisiasi proyek *Made in China 2025* yang memfokuskan pada melakukan inovasi pada sektor perdagangan dengan memanfaatkan teknologi dan memproduksi jasa atau barang yang bernilai teknologi tinggi seperti robotik, aviasi dan aeronautika, peralatan kendaraan, pertanian dan listrik dengan energi terbarukan dan biofarma. Peng-*upgrade*-an pertumbuhan ekonomi ini secara langsung mendukung penggunaan teknologi sebagai strategi pertahanan dan pengembangan *artificial intelligence* dengan memproduksi peralatan sistem keamanan yang canggih, modern dan digital. Sedangkan proyek *Belt and Road Initiative* Tiongkok bertujuan membangun aliansi dagang menghubungkan negara-negara di benua asia, afrika dan eropa. Menurut G.Jhon Ikenberry dalam *From Hegemony to the Balance of Power: the rise of China and American grand strategy in East asia*, bahwa Tiongkok berhasil membentuk *alignment* dengan negara-negara asia dan afrika dibidang ekonomi dan perdagangan dengan dibuktikan adanya proyek *Belt and Road Initiative* dan *Made in China 2025*, akan tetapi dibidang militer Tiongkok belum bisa mengalahkan pengaruh dan kekuatan yang dimiliki Amerika serikat untuk membentuk *alignment* dengan negara-negara asia khususnya asia timur, meski demikian, kehadiran Tiongkok dan upaya-upaya yang dilakukannya meskipun belum sepenuhnya mengungguli kekuatan Amerika serikat sebagai hegemon, telah membuat Amerika serikat merasa terancam pengaruh dan kehadirannya di asia pasifik dengan memberlakukan tarif pada produk asal Tiongkok khususnya dalam *section 301* yang sebagian besar menargetkan produk-produk yang masuk dalam proyek *made in China 2025*.

## KESIMPULAN

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada tahun 2018 dilihat dari perspektif *balance of power* Tiongkok, Kemajuan ekonomi Tiongkok berdampak pada kemajuan dibidang lainnya seperti perkembangan teknologi, bidang pendidikan dan militer serta membangun aliansi atau kerjasama dengan negara lain. Dalam konsep *balance of power* berasumsi bahwa dalam struktur sistem internasional yang anarki dimana tidak adanya otoritas yang berkuasa diatas negara berusaha mempertahankan eksistensi negaranya dengan melakukan *balancing* terhadap *great power* dengan cara mengejar *power* sesuai kebutuhan – bukan untuk menjadi hegemon. *Balance of power* dalam penelitian ini memfokuskan pada *power* yang digunakan Tiongkok untuk mengimbangi kekuatan AS dengan memanfaatkan kekuatan material (*hard power*) yang meliputi kekuatan militer dan strategi pertahanannya dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi tinggi seperti *artificial intelligence*, selain itu kekuatan laten (*soft power*) seperti pertumbuhan ekonomi yang didorong dengan inisiasi proyek *Made In China 2025* dan *Belt and Road Initiative* yang mana kedua program tersebut memfokuskan pada peningkatan produksi dibidang jasa dan penggunaan teknologi tinggi untuk mendukung penghematan energi dan inovasi-inovasi lainnya, Tiongkok berusaha menyeimbangkan kekuatan *great power* Amerika Serikat dengan tetap terus melakukan peningkatan kekuatan secara domestik dan membangun aliansi dengan beberapa negara berkembang lainnya untuk menyeimbangkan pengaruh dan kekuatan yang dimiliki Amerika Serikat. Hingga pada satu titik dimana negara adikuasa Amerika Serikat merasa bahwa kemunculan kekuatan baru Tiongkok dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan hegemoninya. Tiongkok diprediksi pada 2030 akan melampaui kekuatan Amerika Serikat, sebagai upaya untuk mencegah Tiongkok sebagai hegemon, Amerika Serikat melakukan manuver-manuver seperti kebijakan proteksi yang mengarah pada perang dagang untuk menghambat kemajuan dan menghambat inisiasi Tiongkok dimasa depan.

## REFERENSI

- Chen, J. 2020. *BRICS*, diakses pada 6 Juni 2020  
<https://www.investopedia.com/terms/b/bric.asp>
- Davenport, K. 2019, *Nuclear Weapon: Who Has What at a Glance*, diakses pada 10 Juni 2020,  
<https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat>
- Ikenberry, G. J. 2014, *From Hegemony to the balance of power: the rise of China and American grand strategy in East asia*, *International Journal of Korean Unification Studies*, Vol. 23, No. 2, 2014, 41–63.
- Kapustina, L et.al. 2019, *U.S. – China Trade War: Causes and Outcomes*, EDP Sciences,  
<https://doi.org/10.1051/shsconf/20207301012>
- Kennedy, S. 2015, *Made in China 2025*, Centre For Strategic and International Studies, diakses pada 10 Juni 2025 <https://www.csis.org/analysis/made-china-2025>
- Kim, M. H. 2019, *A real driver of U.S. – China trade conflict The Sino-U.S. competition for global hegemony and its implications for the future*, *International Trade, politics and development*, Vol. 3 No. 1, 2019 pp. 30-40. Emerald Publishing Limited.  
[www.emeraldinsight.com/2586-3932.htm](http://www.emeraldinsight.com/2586-3932.htm)
- Lau, J. L. 2019, *The China-U.S. Trade War and Future Economic Relations*, The Chinese University Press, Hong Kong, pp. 2-3.  
[https://play.google.com/books/reader?id=pO9\\_DwAAQBAJ&hl=id&pg=GBS.PA4](https://play.google.com/books/reader?id=pO9_DwAAQBAJ&hl=id&pg=GBS.PA4)
- Masciatelli, B. 2019, *Hue and cry over Huawei: Cold war tensions, security threats or anti-competitive behavior?*, Elsevier, Research in Globalization.  
<https://www.journals.elsevier.com/resglo>

- Morisson, M. W. 2019, *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States*, Congressional Research Service.
- Sherman, J. 2019, *Reframing the U.S. – China AI “Arms Race”*: Why U.S. – China AI Competition Matters. New America, <https://www.jstor.org/stable/resrep19970.6> diakses pada 24 April 2020.
- The World Bank. 2020, diakses pada 12 Juli 2020 <https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#>
- Wang, H. Y. 2007, *The Asian Financial Crisis and Financial Reforms in China*, The Pacific Review, Vol. 12, No. 4, 1999: 537-556, Routledge, diakses pada 3 Juni 2020 <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rpre20>
- Williams, R. B et al. 2019, *‘Trump Administration Tariff Actions: Frequently Asked Questions’*, Congressional Research Service, pp 1-55.
- WITS. 2020, diakses pada 11 Juli 2020, <https://wits.worldbank.org/Download.aspx?Reporter=CHN&Year=2018&TradeFlow=E XPIMP&Type=Partner&Lang=en>
- Zhang, Y. 2018, *The U.S. – China Trade War*, Indian Journal of Asian Affairs, Vol. 31, Nos. 1/2 (Juni – Desember 2018) p. 53 – 74, Manju Jain, diakses pada 9 Oktober 2019 <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26608823>